

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Riwanto. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media: Yogyakarta.

Bagir Manan. 2006. *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press: Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum* Cetakan ke-12. Raja Grafindo: Jakarta.

C.F. Strong. 2004. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern-Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Nusa Media: Jakarta.

Dahlan Thaib, dkk. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Dody Nur Andriyan. 2016. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Rajawali: Yogyakarta.

Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta.

Janedri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press: Jakarta.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Lembaga Kepresidenan*, Pt.Alumni: Jakarta.

Jimly Ashiddiqie. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Rajawali Pers: Jakarta.

_____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformas*. Sinar Grafika: Jakarta.

_____. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

_____. 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN): Jakarta.

_____. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Setara Press: Malang.

Khairul Fahmi. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Rajawali Pers: Jakarta.

Miftah Thoha. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Prima Grafika: Jakarta.



Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.

Muhammad Fauzan Azim. *Quo Vadis Desain Pemilu Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak*. 2015. Rajawali Pers: Jakarta.

Mustafa Lutfi.

Mochamed Isnaeni Ramdhan. 2015. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesi*. Sinar Grafika: Jakarta.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PD. Budi Chaniago. Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, PT Sasatra Hudaya, Jakarta

Moh.Mahfud MD. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta.

Ni'matul Huda. 2012. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

_____. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.

Nurliah Nurdin. 2012. *Komparasi Sisten Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif (2004-2009)*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI): Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.

Richard S Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Nusa Media: Bandung.

Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Rajawali Pers: Jakarta.

Saldi Isra. 2006. *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*. Andalas University: Padang.

_____. 2006. *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Andalas University Press: Jakarta.

_____. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____. 2014. *10 Tahun Bersama SBY*. Kompas: Jakarta.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Buku I. Jakarta.

Seri Buku Panduan. 2002. *Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali kerangka Hukum Pemilu*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Pustaka)*. Rajawali Pers: Jakarta.

Sri Soemantri Martosoewignjo. 2016. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

Tim Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU. *Buku Data Infografik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014*. KPU RI: Jakarta.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. buku V Pemilihan Umum*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

Triya Indra Rahmawan dkk. 2014. *Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, rasionalitas dan status demokrasi konstitusional Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menurut MK*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN): Jakarta.

Wahidah Suaib dan Agung Wasono. 2014. *Buku Panduan Pemilu Tahun 2014*. Kemitraan Partnership: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Jurnal

Suharizal, *Legalitas dan Implikasi Calon Tunggal Pada Pemilu Presiden 2009*. Jurnal Konstitusi. Volume II Nomor 1 Juni 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Veri Junaidi. *Anomali Pendanaan dan Rekrutmen Politik di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol. I. No.1. November 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. Website

Saldi Isra, *Perubahan Undang-Undang Dasar dan Implikasinya*. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal-/19jurnalnasional/384-perubahan-undang-undang-dasar-1945-dan-implikasinya-terhadap-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html>. Di akses pada tanggal 3 Mei 2017 Pada Pukul 16.30 WIB.

<http://kbbi.web.id/tuju> diakses Pada Tanggal 13 Mei 2017 Pada Pukul 21:44 WIB

<http://kbbi.web.id/pilih> diakses Pada Tanggal 13 Mei 2017 21:47 WIB

E. Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015. Tentang Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden versi Pemerintah.

